

KEBIJAKAN ANTI-IMMIGRATION SWISS TAHUN 2014

Noor Auvia Amini¹
Nim. 1302045094

Abstract

This research explains about reason why Swiss made an Anti-Immigration policy as an effort to limit immigration and keeping national's security balance in 2014. Swiss as the heart of Europe had agreement with European Union about Free Movement on Persons that will be the main reason of increasing immigrant. Swiss have long connection with immigrant who have contribute and support for national economy. The analysis uses the concept of Human Security supported by using explanative research type, and also theory of Securitization. Secondary data namely techniques literature review is used by the author based on the book and the internet media through some valid websites. This research found that immigrant threaten Swiss's security in many ways. This result shows that Swiss fear about arising of criminality and highly social assistance that government spend for immigrant. Anti-Immigration policy is a result from people who want to limit the quota of immigrant in Swiss because their negative effect, also factor of xenophobia and islamophobia in Swiss. The main reason of Anti-Immigration policy is to maintain security of Swiss who were disturbed by the presence of immigrant.

Keyword : *Human Security, securitization, Anti-Immigration policy, Swiss*

Pendahuluan

Swiss merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tengah yang memiliki masalah dengan angka pertumbuhan penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan para imigran dan pencari suaka yang meningkat sejak masa perang sehingga mempengaruhi jumlah populasi yang ada. Tingginya kebutuhan tenaga kerja dalam industri memberikan peluang besar bagi imigran dan pencari suaka untuk bekerja di Swiss. Permintaan tenaga kerja ini mendorong pemerintah Swiss untuk melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dalam hal pergerakan tenaga kerja melalui Perjanjian *Free Movement on Persons* dan Perjanjian Schengen.

Free Movement on Persons merupakan salah satu poin dalam kerja sama Bilateral I antara Swiss dengan Uni Eropa yang merepresentasikan paket kontrak kerja sama yang terdiri dari tujuh poin, yaitu riset, kontrak publik, hambatan teknis dalam perdagangan, agrikultur, penerbangan sipil, transportasi darat, dan *Free Movement on Person* (FMP), yang berdasarkan pada ukuran yang ditetapkan dan dipergunakan dalam Uni Eropa. Perjanjian dalam kerja sama bilateral antara Swiss dengan Uni

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : noorauvia.amini@yahoo.com

Eropa yang pertama tersebut ditandatangani pada Juni 1999 dan mulai diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dari rakyat Swiss dalam referendum yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2000.

Sedangkan Perjanjian Schengen termasuk dalam kerjasama Bilateral II antara Swiss-EU yang merupakan lanjutan dari Bilateral I. Dalam Bilateral II terdiri dari Sembilan poin, yaitu Schengen/Dublin, penurunan pajak, perlawanan terhadap penipuan. Pengembangan produk agrikultur, media, lingkungan, statistic, dana pension, dan pendidikan. Perjanjian Bilateral II ditandatangani pada Oktober 2004 dan mulai diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dari rakyat Swiss dalam referendum yang diadakan pada 5 Juni 2005.

Perjanjian FMP antara Swiss dan Uni Eropa menyebabkan pergerakan imigrasi dari Uni Eropa mencapai lebih dari 1 juta orang dimana 230.000 orang merupakan para pekerja imigran. Di lain pihak, warga Swiss yang melakukan imigrasi ke wilayah Uni Eropa sekitar 430.000 orang. Hingga akhir tahun 2014, sebanyak 1.324.000 warga EU telah terdaftar sebagai imigran di Swiss sebagai dampak dari perjanjian FMP (*EU relations with Switzerland*, 2016).

Sedangkan pemberlakuan Schengen Area memberikan kemudahan bagi imigran untuk masuk ke Swiss tanpa memakai visa. Hal ini terlihat dari meningkatnya aplikasi suaka sebanyak 45% pada tahun 2011 yang merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2002. Terhitung sebanyak 36,5% yang ditangani oleh pemerintah Swiss pada tahun 2011.

Menurut laporan *International Migration Outlook 2014*, Swiss merupakan negara dengan jumlah imigran permanen per kapita terbesar pada tahun 2012. Sebagian besar penyumbang imigran berasal dari negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Portugal, dan Italia (*Switzerland has highest number of immigrant*, 2014). Swiss juga menjadi rumah bagi para imigran yang berasal dari Balkan, Asia, dan Afrika untuk mencari perlindungan suaka.

Namun, pada 9 Februari 2014, mayoritas masyarakat Swiss menyetujui referendum untuk membatasi imigran. Mayoritas pemilih tersebut pun tak jauh berbeda jumlahnya dengan yang menolak, karena hanya berada dalam kisaran 50,34% saja. Konsekuensi dari hal tersebut jelas, pembatasan kuota imigran akan dilaksanakan.

Referendum itu diprakarsai Partai Rakyat Swiss, SVP. Partai Rakyat Swiss merupakan partai sayap kanan di dinamika politik Swiss. Dalam sejarahnya, partai ini merupakan gabungan dari partai petani, partai buruh, dan partai penduduk dari kanton agraria protestan, *German-speaking Swiss* sekitar tahun 1910an atau dikenal dengan *The BGB*. Secara umum partai ini adalah partai konservatif, namun sejak pasca PD II partai ini berpartisipasi aktif dalam konsensus politik pasca perang. Pada 1971, *The BGB* bergabung dengan dua partai demokratis dan sejak itu namanya berubah menjadi *Swiss People Party's* (SVP) (*Swiss People's Party*, 2013).

Pada 1977, dibawah kepemimpinan Christoph Blocher, seorang pebisnis berumur 36 tahun yang terpilih sebagai presiden partai SVP cabang Zurich, mengadopsi agenda

konservatif populis sayap kanan, seperti fokus pada masalah imigrasi, kesejahteraan sosial, perpajakan dan kriminal (*The Politics and Government of Switzerland*, 2004).

Sejak mengadopsi agenda-agenda tersebut, partai SVP berhasil menjadi salah satu partai terkuat di Swiss. Beberapa agenda yang diprakarsai oleh partai ini ialah mobilisasi pemilu dalam melawan *Europeanisation*, menolak proposal Swiss untuk bergabung dengan Uni Eropa pada 1992, kebijakan pelarangan menggunakan hijab dan niqab, pelarangan adanya menara masjid di Swiss tahun 2013, termasuk juga kebijakan *Anti-Immigration* yang mulai dikampanyekan pada tahun 2010. Terbukti melalui agenda-agenda tersebut, suara bagi partai SVP terus naik hingga pada 2011 partai tersebut memperoleh 26% suara, tertinggi dari partai-partai lainnya (SVP, 2013). Selain itu sejak pasca kemenangan referendum kebijakan *Anti-Immigration*, partai SVP kembali berhasil memenangkan pemilu di Swiss dengan rekor 29,4%. Dari pemilihan nasional tahun 2007 hingga tahun-tahun berikutnya, masalah imigrasi menjadi isu utama bagi SVP (*Multicultural Switzerland and the Challenge of Immigration*, 1994a).

Referendum yang dilaksanakan pada 9 Februari 2014 telah mendukung inisiatif untuk memberlakukan kuota tahunan imigrasi. Hasil referendum akan diimplementasikan ke dalam hukum Swiss pada Februari 2017 yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah sistem baru berdasarkan pada batas kuantitatif dan kuota imigrasi negara.

Referendum yang meloloskan kebijakan *Anti-Immigration* tersebut telah mendukung inisiatif untuk memberlakukan kuota tahunan imigrasi. Hasil referendum akan diimplementasikan ke dalam hukum Swiss pada Februari 2017 yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah sistem baru berdasarkan pada batas kuantitatif dan kuota imigrasi negara, termasuk mobilitas warga negara dari negara-negara anggota Uni Eropa.

Namun, ternyata kebijakan *Anti-Immigration* ini menuai banyak respon negatif. Banyak kalangan menilai kebijakan ini justru akan lebih merugikan perekonomian Swiss. Dilemanya, selain karena kebutuhan Swiss akan tenaga kerja asing untuk memenuhi permintaan pasar kerja yang tinggi, hubungan antara Swiss dengan Uni Eropa juga akan terganggu, bahkan perjanjian Bilateral I dengan Uni Eropa yang telah membuka pasar besar bagi produk-produk Swiss di seluruh Uni Eropa dan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi juga terancam batal. Padahal tercatat 62% ekspor dan 79% impor Swiss sangat bergantung pada Uni Eropa, Swiss merupakan negara kedua partner terbesar Uni Eropa jika sektor jasa juga dimasukkan (*Switzerland in Europe after the Referendum on Immigration Quotas*, 2014).

Tulisan ini akan menjelaskan apa alasan Swiss membuat kebijakan *Anti-Immigration* tahun 2014.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep ***Konsep Human Security***

Secara konseptual *national security* mengalami pergeseran makna menjadi sebuah konsep yang tidak lagi terpusat pada negara, melainkan terpusat pada individu dan

masyarakat di negara manapun di seluruh dunia. Inilah yang kita kenal sekarang dengan konsep *Human Security*. Penjelasan ini menggambarkan bahwa kepentingan individu menjadi pertimbangan negara dalam menentukan sebuah kebijakan.

Konsep *Human Security* pertama sekali berkembang sejalan dengan berdirinya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada 1896. Konsep *Human Security* yang mengemuka pasca Perang Dingin langsung mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, seperti kalangan pengkaji keamanan dan para pembuat kebijakan. Beberapa pengertian mengenai *Human Security* mulai dikemukakan oleh berbagai ahli.

Amitav Acharya dalam karyanya *The Nexus Between Human Security and Traditional Security in Asia* menuliskan bahwa *Human Security* mempunyai tiga definisi, yaitu:

freedom from fear (as stressed by human rights advocates in Asia and elsewhere), freedom from want (as stressed by some Asian governments such as Japan), and freedom from cruelty and suffering in times of conflict (as stressed by the former Canadian Foreign Minister Lloyd Axworthy) (Human Security in East Asia, part II, 2004).

Salah satu aspek yang disebut diatas adalah *Freedom from Want*, yaitu konsep keamanan untuk terbebas dari ancaman kronis berupa kelaparan, penyakit dan represi yang membutuhkan perencanaan panjang dan investasi dalam pengembangannya.

Mengenai *Freedom from Want* dari yang diungkapkan oleh Acharya sebelumnya, UNDP juga menawarkan 7 komponen dalam konsep *human security* yang meliputi keamanan ekonomi (*Economic Security*), keamanan pangan (*Food Security*), keamanan kesehatan (*Health Security*), keamanan lingkungan (*Environmental Security*), keamanan pribadi (*Personal Security*), keamanan komunitas (*Community Security*), dan keamanan politik (*Political Security*) (*Human Security In Theory and Practice*, 2009).

Menurut Acharya, *Human Security* adalah sebuah respon yang rasional terhadap globalisasi kebijakan internasional. Pemerintah, menurut Acharya dalam berbagai hal harus mengambil kebijakan yang luas lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik dan invansi oleh tentara asing. Ia menyarankan bahwa 3 rasionalitas diatas adalah dasar dalam mengambil kebijakan *Human Security* sehingga pada akhirnya beberapa akademisi menunjukkan bahwa *Human Security* adalah kerangka yang dievaluasi pengertiannya dan bagian daripada norma kedaulatan.

Dalam pembuatan kebijakan *Anti-Immigration*, alasan Swiss terhadap kebijakan ini ialah upaya negara yang dilakukan melalui sebuah kebijakan untuk melindungi warga negaranya dari beberapa isu keamanan internasional yang dianggap mengancam keseimbangan dan kesejahteraan warga negaranya. *Human Security* menawarkan jawaban terhadap rumusan masalah yang digambarkan melalui 7 pola dasar pemikiran. Dari 7 komponen tersebut, ada 3 komponen yang dapat berperan sebagai

pola jawaban mengenai alasan yang mendorong dibentuknya kebijakan *Anti-Immigration* Swiss. 3 komponen tersebut ialah keamanan ekonomi terkait akses terhadap pekerjaan, pendapatan, lahan, dan pelayanan masyarakat, keamanan pribadi terkait jaminan terhadap rasa aman dari kejahatan, dan keamanan komunitas terkait perlindungan terhadap nilai asli Swiss dan perdamaian antar komunitas.

Teori Sekuritisasi

Untuk melengkapi penjelasan dalam *Human Security*, digunakan juga sekuritisasi menurut Christin Acherman, Clément de Senarclens, dan Robin Stünzi sebagai dasar pemikiran dalam menjawab alasan yang melatarbelakangi dibentuknya kebijakan *Anti-Immigration*. Dalam laporan Christin Acherman, Clément de Senarclens, dan Robin Stünzi yang berjudul *Migration and Security in Switzerland: Evolution and present status of its link in politics and law* berpendapat bahwa sekuritisasi dalam kerangka pemahamannya dapat dilihat melalui dua konsep, yaitu sebagai dasar pemikiran dan sebagai proses (*Migration and Security in Switzerland: Evolution and present status of its link in politics and law*, 2013).

Kerangka pemikiran ini terinspirasi dari pendekatan Barry Buzan, Waever dan Jaap de Wilde, namun pemahamannya telah diadaptasi dan dikembangkan. Analisis ide ini mengilustrasikan bahwa pemahaman terhadap keamanan tidak bisa hanya dibatasi pada pada eksistensial ancaman secara eksklusif saja contohnya terorisme, tetapi konsepnya diperluas mencakup jenis-jenis ancaman lain dan harus mempertimbangkan dimensi lain yang juga potensial, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

Sekuritisasi sebagai proses dapat dilihat dalam argumen Buzan, Waever, Jaap de Wilde yang mengatakan dalam melakukan analisa keamanan, pengartikulasian keamanan membutuhkan tiga bentuk unit yang berkaitan dengan upaya analisa keamanan yang antara lain terdiri dari (*Securitization and Desecuritization* dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*, 1995):

- a) *Referent objects*: Sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan berhak untuk menyatakan dirinya terancam. *Referent Objects* adalah sesuatu yang dianggap sebagai ancaman dan mempunyai tuntutan resmi untuk bertahan. Dalam pandangan tradisional yang menjadi *referent object* ini biasanya negara ataupun bangsa. Tapi dalam pandangan *Copenhagen School* saat ini tidak hanya negara ataupun bangsa yang bisa menjadi *referent object* melainkan berbagai spektrum memungkinkan untuk menjadi *referent object*. Pada dasarnya, aktor yang memunculkan isu keamanan bisa saja membangun segala sesuatu sebagai *referent object*. Perbedaan kemampuan aktor dalam membuat sebuah isu menjadi isu keamanan menyebabkan ada isu yang berhasil dibangun menjadi isu keamanan dan ada juga isu yang pada akhirnya karena ketidakmampuan aktornya tidak dijadikan sebagai isu keamanan.
- b) *Securitizing actors*: Aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu. *Securitizing actors* adalah seseorang ataupun kelompok yang

membuat sebuah isu menjadi isu keamanan. Aktor dalam masalah keamanan yaitu pimpinan politik, birokrat, pemerintah, pelobi, dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan. Dalam sekuritisasi isu pangan aktor dominan melibatkan tiga kekuatan besar yaitu birokrat (termasuk didalamnya pemerintah yang sedang berkuasa di tingkat internasional, nasional, dan daerah serta pimpinan politik dan sosial baik yang berkuasa ataupun oposisi).

- c) *Functional actors*: Aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sector tanpa harus bertindak sebagai *referent objects* atau pun *securitizing actors*.

Sedangkan sekuritisasi sebagai dasar pemikiran dapat dilihat sebagai gagasan mengenai keamanan yang digambarkan melalui tiga elemen konstitutif, yaitu adanya (1) ancaman yang (2) membahayakan objek-objek tertentu sehingga diperlukan (3) tindakan-tindakan prioritas yang bertujuan untuk menjamin keamanan.

Dalam penelitian ini Sekuritisasi yang digunakan ialah Sekuritisasi sebagai dasar pemikiran, yaitu untuk menjelaskan bentuk ancaman, dan bentuk ancaman yang nyata tersebut akan dijelaskan dengan meminjam kembali elemen-elemen dalam *Human Security* yaitu ancaman terhadap keamanan ekonomi, keamanan pribadi, dan keamanan komunitas. Hal-hal yang menjadi alasan Swiss dalam membuat kebijakan *Anti-Immigration* termasuk identifikasi bentuk ancaman yang dianggap membahayakan Swiss, sehingga upaya yang dilakukan untuk melindungi Swiss dari ancaman-ancaman tersebut dibuatlah kebijakan *Anti-Immigration* yang diyakini sebagai tindakan yang tepat untuk melindungi dan menjamin keamanan Swiss.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode ilustratif yaitu metode yang mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Alasan Swiss membuat Kebijakan *Anti-Immigration* dapat dijelaskan melalui teori sekuritisasi oleh Christin Acherman, Clément de Senarclens, dan Robin Stünzi dan konsep *Human Security* oleh UNDP. Berdasarkan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Christin Acherman, Clément de Senarclens, dan Robin Stünzi, gagasan mengenai keamanan digambarkan melalui tiga elemen yaitu adanya (1) ancaman yang (2) membahayakan objek-objek tertentu sehingga diperlukan (3) tindakan-tindakan prioritas yang bertujuan untuk menjamin keamanan. Dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi alasan Swiss dalam membuat kebijakan *Anti-Immigration* termasuk identifikasi bentuk ancaman yang dianggap membahayakan Swiss, sehingga upaya yang dilakukan untuk melindungi Swiss dari ancaman-ancaman tersebut dibuatlah kebijakan *Anti-Immigration* yang diyakini sebagai tindakan yang tepat untuk melindungi dan menjamin keamanan Swiss.

Sedangkan konsep *Human Security* oleh UNDP akan menjelaskan bentuk nyata dari ancaman tersebut yang dijelaskan dengan meminjam komponen-komponen dalam konsep tersebut. Adapun komponen-komponen dalam *Human Security* yang akan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman nyata sebagai alasan Swiss membuat kebijakan *Anti-Immigration* ialah keamanan ekonomi, keamanan pribadi, dan keamanan komunitas.

Keamanan Ekonomi

Keterbukaan Swiss dalam menerima kedatangan imigran dan pencari suaka sejak diberlakukannya perjanjian *Free Movement of Person* memberikan peluang bagi imigran untuk masuk dengan mudah ke Swiss. Peningkatan jumlah kedatangan imigran dan pencari suaka yang cukup signifikan setiap tahunnya ini menimbulkan ancaman dan masalah tersendiri bagi keamanan negara Swiss. Salah satunya ialah ancaman terhadap keamanan ekonomi yaitu terkait akses terhadap pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal, dan bantuan sosial.

Terkait ancaman akses penuh terhadap kesempatan kerja, semakin banyaknya pekerja asing di Swiss, menyebabkan persaingan yang semakin ketat antara pekerja asli Swiss dengan pekerja asing. Inisiatif SVP salah satunya dipengaruhi sentimen anti-asing dan sikap konservatif terhadap pertumbuhan penduduk serta kekhawatiran pada kepentingan penduduk asli Swiss (*Party Programme*, 2014). SVP melihat banyak warga Swiss sendiri sulit mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan populer, karena para pekerja asing telah mengambil jatah tersebut.

Pekerja asing terbanyak yang masuk ke Swiss ialah dari negara-negara anggota EU dan biasanya mereka merupakan pekerja berkualitas dan kualifikasinya memenuhi standar di Swiss. *Skilled immigrant* yang terlalu banyak menambah kepadatan penduduk dan mengurangi lowongan kerja yang bisa diakses penduduk asli Swiss.

Permasalahan yang banyak terjadi ialah banyak pekerja asing yang mau dibayar lebih murah atau dibawah standar gaji agar bisa bertahan hidup di Swiss. Seperti prinsip ekonomi, kebanyakan bos atau atasan pasti akan lebih memilih mempekerjakan pekerja dengan upah yang lebih murah apalagi jika keduanya memiliki standar kualitas yang sama-sama bagus agar dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran pekerja asli akan kalah bersaing dengan pekerja asing dan pekerja asing akan banyak menguasai lapangan pekerjaan di Swiss. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan standar upah pekerja sebagai akibat dari sikap pekerja asing tersebut.

Gelombang imigran menurut mereka juga mengancam akses pada tempat tinggal. Untuk negara berwilayah kecil seperti Swiss yang luas wilayahnya 41.285 km² dan sebagian wilayahnya merupakan pegunungan Alpen (Switzerland, 2012), semakin banyaknya imigran masuk ke Swiss menyebabkan semakin padatnya penduduk di Swiss, lalu lintas semakin macet, permintaan dan kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat menyebabkan harga sewa tempat tinggal di Swiss semakin mahal.

Selain itu, menurut SVP, imigran dan pencari suaka yang bermigrasi tersebut hanya untuk mengklaim bantuan sosial dan perumahan bersubsidi. Bantuan sosial yang banyak diberikan untuk imigran dan pencari suaka menguras keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan data dari Kantor Statistik Federal, pada tahun 2012 tingkat klaim kesejahteraan sosial penduduk asing adalah 6,3% atau sekitar 250.333 orang asing yang menerima tunjangan kesejahteraan sosial. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan klaim kesejahteraan sosial warga asli yaitu hanya 2,6% (*Swiss Social Poverty Claim*, 2013).

Walaupun sebagian besar pekerja asing memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing dengan pekerja asli, namun banyak juga pekerja yang kurang kompetitif. Untuk negara kecil seperti Swiss, lowongan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pelamarnya menyebabkan persaingan antar tenaga kerja menjadi sangat ketat. Oleh karena itu imigran menjadi subjek yang paling rentan terhadap kehilangan pekerjaan karena mereka biasanya memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih rendah.

Keamanan Pribadi

Imigrasi yang tidak terkontrol juga mengancam keamanan pribadi yaitu terkait jaminan terhadap rasa aman dari kejahatan. Lonjakan tajam kedatangan imigran dan pencari suaka terjadi pada dua tahun terakhir sebelum dilakukannya referendum imigrasi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang merupakan skala terbesar sejak kedatangan imigran di tahun 2002. Oleh sebab jumlah peningkatan tersebut Swiss mulai merasa khawatir dengan stabilitas keamanan negaranya.

Kehadiran para imigran memunculkan banyak pandangan di dalam masyarakat Swiss sendiri. Sebagian masyarakat menganggap kehadiran imigran ialah wajar, namun sebagian lainnya menganggap mereka sebagai hal yang merugikan negara. Peningkatan jumlah imigran yang masuk ke Swiss meningkatkan kekhawatiran atas stabilitas keamanan di negara Swiss serta angka kriminalitas di Swiss. Dilihat dari segi keamanan, imigran contohnya pencari suaka banyak diidentikkan dengan terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan narkoba, dan kejahatan berat lainnya.

Pada tahun 2010, statistik daftar kejahatan berdasarkan kewarganegaraan diterbitkan. Sampel penelitian yang digunakan ialah penduduk laki-laki antara 18 dan 34 tahun untuk setiap kelompok. Dari data ini, terlihat bahwa tingkat kejahatan imigran lebih tinggi daripada warga negara Swiss sendiri, dengan kelompok yang berasal dari Angola, Nigeria dan Algeria yang tingkat kejahatan mencapai sekitar 60% dari populasi Swiss (*Kriminalitt in der Schweiz*, 2016).

Ada beberapa alasan mengapa kriminalitas banyak dilakukan oleh imigran. Diantaranya karena struktur populasi imigran, kondisi sosial, perbedaan budaya, perubahan keadaan, dan lain sebagainya. Imigran yang berasal dari luar Eropa, biasanya memiliki kualifikasi yang kurang baik sehingga memiliki kesempatan yang rendah dalam mendapatkan pekerjaan. Sementara itu pencari suaka tidak diperbolehkan untuk bekerja di Swiss dan hanya memanfaatkan bantuan sosial.

Pemberlakuan perjanjian Schengen juga mengurangi kontrol keamanan di perbatasan sehingga siapapun yang memiliki visa Schengen diperbolehkan masuk ke Swiss tanpa pemeriksaan yang ketat dan tidak menutup kemungkinan hal ini memberikan kesempatan bagi organisasi kriminal untuk berkembang di Swiss.

Keamanan Komunitas

Selain ancaman terhadap keamanan ekonomi dan keamanan pribadi, imigrasi yang tidak terkontrol juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan komunitas yaitu terkait perlindungan terhadap martabat budaya dan perdamaian antar komunitas. Dalam penelitian ini, ancaman yang dimaksud ialah terkait ancaman terhadap nilai tradisional Swiss dan peningkatan faktor *Xenophobia* dan *Islamophobia* dalam masyarakat Swiss.

Nilai tradisional Swiss yang ingin dilindungi oleh partai SVP ialah prinsip netralitas sebagai identitas nasional Swiss. Swiss bukan merupakan satu-satunya negara yang mengusung prinsip netralitas sebagai identitas nasional. Akan tetapi, netralitas Swiss memiliki akar yang jauh lebih mendalam daripada negara-negara netral Eropa lain, yaitu Swedia, Finlandia, dan Austria, karena netralitas Swiss tidak hanya dalam level pemerintahan dan sebagai implementasi kebijakan negara, tetapi juga telah menjadi karakteristik Swiss secara holistik dalam setiap bagian struktur sosial Swiss, yang terbagi-bagi ke dalam kanton dan bahkan dalam setiap individu. Hal ini berpengaruh ke dalam setiap pola aksi, reaksi, dan cara interaksi Swiss dalam sistem dunia internasional.

Konsepsi atas prinsip netralitas Swiss terbentuk karena pernyataan St. Niklaus von Flüe, “*Do not meddle in foreign disputes*” (*Historical Dictionary of Switzerland*, 2007), pada tahun 1481. Pernyataan tersebut berarti untuk tidak terlibat dalam perselisihan luar negeri, yang akhirnya menjadi dasar sikap netral Swiss.

Namun dalam dinamikanya, netralitas Swiss mengalami sedikit demi sedikit perubahan. Pada awal pembentukan negara Swiss, prinsip netralitas yang dianut Swiss ialah netral secara politik, militer, hingga sosial dan membuat Swiss menjadi negara yang sangat tertutup dari interaksi dengan dunia internasional. Berdasarkan pernyataan dari St. Niklaus von Flüe, prinsip ini diyakini masyarakat Swiss dapat melindungi negara Swiss dari ancaman dan serangan negara lain karena tidak ada keterlibatan dan interaksi dengan negara lain tersebut. Selanjutnya prinsip netralitas Swiss berubah sedikit dengan mulai membuka diri secara sosial, yaitu ditandai dengan mulai ikut serta dalam pola interaksi sistem dunia internasional. Tetapi, kebijakan dan kepentingan luar negeri Swiss, tidak diarahkan pada intervensi dalam bentuk apapun terhadap otoritas aktor lain atau dengan kata lain Swiss tetap netral secara politik dan militer. Selain itu netralitas Swiss, juga berarti bahwa Swiss sebagai sebuah negara yang berdaulat memproteksi kedaulatan dan otoritasnya atas kekuatan-kekuatan pihak eksternal yang berusaha untuk mengintervensi. Kenetralan Swiss, memiliki karakteristik yang *self-determined*, permanen, dan dijaga dengan ketat (*Swiss Neutrality*, 2004).

Perubahan-perubahan dalam prinsip netralitas Swiss ini disesuaikan dengan dinamika dunia internasional. Terdapat peningkatan kompleksitas dari relasional dalam sistem, yaitu adanya perkembangan terhadap fokus dunia internasional yang tidak hanya pada *high politics* lagi, tetapi terfokus pada *low politics*. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri dari aktor negara menjadi semakin kompleks untuk mencapai *national interest* masing-masing. Oleh karena itu, Swiss cenderung melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam dunia internasional (*Switzerland and the World*, 2013), yang ‘memaksa’ Swiss untuk melakukan perubahan definisi dan batasan dalam konstruksi identitas, yaitu netralitas Swiss.

Salah satu contoh perubahan identitas nasional Swiss yang netral terlihat pada keikutsertaan Swiss dalam *Free Movement on Person (FMP) Agreement* yang merupakan salah satu poin dalam *Bilateral Agreements I* tahun 1999 dan keikutsertaan Swiss dalam *Schengen Treaty* yang merupakan salah satu poin dalam *Bilateral Agreements II* antara Swiss dengan Uni Eropa yang disetujui oleh publik Swiss dalam referendum Juni 2005 (*Switzerland and the World*, 2013).

Kerjasama Bilateral I antara Swiss dengan Uni Eropa, merepresentasikan paket kontrak kerja sama yang terdiri dari tujuh poin, yaitu riset, kontrak publik, hambatan teknis dalam perdagangan, agrikultur, penerbangan sipil, transportasi darat, dan *Free Movement on Person (FMP)*, yang berdasarkan pada ukuran yang ditetapkan dan dipergunakan dalam Uni Eropa. Perjanjian dalam kerja sama bilateral antara Swiss dengan Uni Eropa yang pertama tersebut ditandatangani pada Juni 1999 dan mulai diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dari rakyat Swiss dalam referendum yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2000.

Kemudian kerjasama Swiss-EU dilanjutkan melalui Bilateral II yang terdiri dari Sembilan poin, yaitu Schengen/Dublin, penurunan pajak, perlawanan terhadap penipuan. Pengembangan produk agrikultur, media, lingkungan, statistic, dana pension, dan pendidikan. Perjanjian Bilateral II ditandatangani pada Oktober 2004 dan mulai diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dari rakyat Swiss dalam referendum yang diadakan pada 5 Juni 2005.

Schengen Treaty merupakan sebuah perjanjian dalam tubuh Uni Eropa pada tahun 1985, yang mengatur mengenai persoalan *state border* di antara negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian tersebut. *Schengen Treaty* adalah perjanjian dalam lingkup sosial, dimana dalam perjanjian ini terdapat suatu pergerakan secara sosial karena warga negara Eropa maupun non Eropa yang memiliki visa *Schengen* dapat mobilisasi keluar masuk dari satu negara Eropa ke negara Eropa lainnya dan juga bekerja di negara-negara Eropa yang tergabung.

Perubahan pada prinsip netralitas Swiss ini tidak bisa dilepaskan dari faktor kebebasan imigrasi di Swiss yang sejak pasca PD II membuka peluang besar pasar tenaga kerja di Swiss bahkan membuat Swiss bergantung pada tenaga kerja asing untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja yang tinggi. Banyaknya imigran yang masuk ke Swiss dan berbaur dengan masyarakat asli Swiss perlahan mempengaruhi

dan merubah persepsi masyarakat Swiss. Akhirnya keadaan ini berimbas pada perubahan identitas nasional Swiss tersebut.

Melihat hal ini, partai SVP khawatir jika imigrasi tidak segera dibatasi, semakin lama bukan hanya mengubah nilai tradisional Swiss sedikit demi sedikit namun akan menghilangkan nilai tradisional tersebut.

Selain kekhawatiran akan hilangnya prinsip netralitas sebagai identitas Swiss akibat kebebasan imigrasi, partai SVP juga khawatir imigrasi yang tidak terkontrol dan perubahan perubahan prinsip netralitas Swiss akan berimbas pada *direct democracy* yang telah dianut Swiss sejak 1848. Partai SVP khawatir kedatangan imigran di Swiss yang sebagian besar berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa dan percampuran berbagai budayanya akan berdampak pada perubahan persepsi masyarakat Swiss tentang ide bergabungnya Swiss menjadi anggota Uni Eropa.

Referendum untuk bergabungnya Swiss menjadi anggota Uni Eropa sendiri pernah dilakukan sebanyak 2 kali di Swiss yaitu pada tahun 1997 dan tahun 2001 namun kedua referendum inisiatif populer tersebut ditolak oleh sebagian besar rakyat Swiss. Partai SVP termasuk salah satu partai yang pada saat itu gencar mengkampanyekan untuk menolak ide tersebut. Salah satu argumen yang mereka kampanyekan ialah terkait demokrasi langsung Swiss.

Demokrasi langsung Swiss menjadi salah satu sistem politik Swiss yang ingin dijaga eksistensinya. Seperti halnya prinsip netralitas yang telah mengakar pada kehidupan sosial rakyat Swiss, demokrasi langsung Swiss bukan hanya sekedar sistem politik yang dianut namun telah menjadi budaya masyarakat Swiss. Partai SVP menyatakan jika Swiss menjadi anggota Uni Eropa maka demokrasi langsung tidak bisa diberlakukan lagi. Hal ini dikarenakan Uni Eropa yang pemerintahannya bersifat supra-nasional akan menghalangi kebebasan berdemokrasi Swiss. Suara rakyat tidak akan lagi menjadi acuan pemerintah untuk bertindak, melainkan harus melalui persetujuan parlemen Eropa jika Swiss bergabung. Oleh karena itu masyarakat Swiss meyakini keputusan untuk tidak berada dibawah naungan Uni Eropa, tetapi lebih memilih untuk berada sejajar dengan Uni Eropa.

Selain ancaman terhadap nilai tradisional Swiss tersebut, imigrasi yang tidak terkontrol juga menimbulkan faktor *Xenophobia* dan *Islamophobia* dalam masyarakat Swiss. Hal ini ditandai dengan banyaknya perilaku diskriminasi dan pelanggaran terhadap para imigran terutama yang berasal dari Eropa Timur dan negara-negara muslim. Menurut sebuah survei yang diterbitkan pada bulan Juni 2006 yang mengukur perkembangan sikap *Xenophobia* dan ekstremis sayap kanan, lebih dari separuh penduduk Swiss mengidap *Xenophobia*. Selama kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang Rasisme, Doudou Diène, pada bulan Januari 2006, melaporkan bahwa Swiss menderita rasisme, diskriminasi dan *Xenophobia*. Diène mengatakan bahwa rasisme merupakan hal yang disepelkan, terutama di kalangan politik. Politik Swiss dan perdebatan publik ditandai dengan pembahasan tentang isu asing, perlakuan terhadap asing, definisi tentang asing, dan kebijakan yang berkaitan dengan mereka (*Racism is also reality in Switzerland*, 2015).

Faktor *Xenophobia* dan *Islamophobia* dalam konstruksi netralitas Swiss berdampak kontroversif terhadap kebijakan-kebijakan Swiss bagi kaum imigran, terutama pengungsi dan pencari suaka selama kurang lebih tiga dekade. Partai Swiss yang berafiliasi kanan dan kekuatan pergerakan *Xenophobia*, menolak dan melawan pertumbuhan pengungsi dan kebijakan yang mendukungnya (*Swiss Democracy : Possible Solution to Conflict in Multicultural Societies*, 1998b). Mereka berpendapat bahwa imigran yang datang dan masuk ke Swiss adalah pengungsi dan pencari suaka palsu yang masuk ke dalam Swiss hanya untuk tujuan ekonomi, bukan sosial dan politik. Kemudian, mereka menuntut akan adanya kebijakan dan regulasi yang ketat terhadap pengungsi dan pencari suaka, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang kompleks sehingga mempersulit masuknya imigran ke dalam Swiss. Akhirnya keinginan mereka berhasil direalisasikan melalui kebijakan *Anti-Immigration*.

Selain ketakutan terhadap asing, kebebasan imigrasi juga semakin memperparah *Islamophobia* dalam masyarakat Swiss. Hal ini terlihat melalui beberapa kebijakan di negara Swiss seperti pelarangan terhadap adanya menara masjid dan pelarangan penggunaan jilbab dan niqab (selubung wajah) bagi muslim Swiss. Faktor *Islamophobia* dalam masyarakat Swiss muncul karena ketakutan yang tumbuh terhadap agama Islam sebagai respons atas kejahatan kelompok radikal dan terorisme yang banyak dilakukan mengatasnamakan jihad. Hal ini akhirnya berdampak pada meningkatnya diskriminasi terhadap pemeluk agama Islam dan menjauhkan mereka dari masyarakat Swiss.

Ketakutan dan diskriminasi ini semakin parah setelah terjadinya serangan teroris di New York pada 11 September 2001 dan peperangan di beberapa negara di Timur Tengah. Dinamika diskriminasi dan kontradiksi terhadap imigran ini menjadi isu migrasi yang diperbincangkan di tingkat internasional. Contoh lainnya yaitu perang Suriah yang juga memberikan dampak secara tidak langsung yaitu munculnya imigran massal yang mencari suaka ke Swiss. Berikut salah satu bentuk *Islamophobia* di Swiss:

Suara mayoritas rakyat Swiss yang pro terhadap kebijakan *Anti-Immigration* merupakan akibat dari adanya ketakutan terhadap imigran dengan berbagai macam latar belakang identitas dan budaya yang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Swiss akan menggeser bahkan menghilangkan nilai tradisional Swiss. Ketakutan tersebut, selain karena diakibatkan adanya latar belakang pengaruh *Xenophobia* dan *Islamophobia* dalam kehidupan sosial rakyat Swiss, juga karena 90% dari pengungsi dan pencari suaka memasuki Swiss secara ilegal dan tanpa adanya dokumen dan identitas resmi (*Historical Dictionary of Switzerland*, 2007). Kemudian, dengan adanya peningkatan imigrasi, maka tingkat persaingan rakyat Swiss dalam lapangan pekerjaan semakin tinggi, dan juga adanya peningkatan dalam level kriminalitas. Faktor ini semakin memperkuat ketakutan dan ketidakpercayaan akan asing dalam masyarakat dan kehidupan sosial Swiss.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dan berbagai referensi yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan imigran di Swiss telah menjadi perdebatan publik yang belum selesai selama bertahun-tahun. Mereka

datang ke Swiss sejak dalam jangka waktu yang sangat lama dan telah berkontribusi dalam banyak bidang di Swiss. Imigran terbesar yang datang ke Swiss berasal dari Jerman, Portugal, dan Italia. Sementara pencari suaka terbanyak berasal dari luar Eropa seperti Eritrea, Syria, dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik.

Kedatangan imigran dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Swiss sehingga menyebabkan banyaknya diskriminasi yang terjadi. Selain itu, peningkatan imigrasi semakin memperbesar *xenophobia* dan *islamophobia* di kalangan masyarakat Swiss sehingga menimbulkan desakan terhadap pemerintah untuk membatasi kedatangan mereka. Swiss menjadi negara tujuan imigrasi tertinggi di Eropa selama abad 20. Hal ini dikarenakan daya tarik bagi imigran terutama dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.

Pemberlakuan perjanjian FMP menjadi penyebab utama peningkatan imigrasi di Swiss. Hal ini juga berdampak negatif dengan meningkatnya kriminalitas oleh imigran dan pencari suaka serta penyalahgunaan bantuan sosial yang diberikan kepada mereka. Pemerintah Swiss menghabiskan dana yang sangat besar dalam mengelola imigran setiap tahunnya. Desakan masyarakat untuk membatasi imigran dan pencari suaka difasilitasi oleh *Swiss People's Party (SVP)* yang juga merupakan partai pendukung anti imigran di Swiss. Inisiatif Kebijakan *Anti-Immigration* ini sebagian besar didukung oleh masyarakat Swiss yang berbahasa Italia. Sementara penolakan berasal dari masyarakat Swiss berbahasa Perancis dan Jerman.

Swiss telah melaksanakan referendum pada tanggal 9 Februari 2014 dengan asil referendum yakni 50,3% masyarakat Swiss menyatakan mendukung pembatasan imigrasi missal dan 49,7% menyatakan menolak. Hal ini berarti bahwa pemerintah Swiss harus mengadopsi inisiatif populer tersebut ke dalam kebijakan nasional dalam jangka waktu 3 tahun. Uni Eropa dan beberapa mitra kerja Swiss lainnya menolak hasil referendum tersebut. Hal ini juga berdampak dengan kerjasama Swiss dengan Uni Eropa dan beberapa mitra kerja lainnya.

Peningkatan imigrasi menghilangkan kontrol pemerintah terhadap keamanan non-tradisional yang ada di Swiss sehingga menimbulkan berbagai ancaman di tengah-tengah masyarakat Swiss. Beberapa bentuk ancaman tersebut ialah seperti ancaman terhadap keamanan ekonomi yang meliputi peningkatan persaingan antara tenaga kerja asli Swiss dengan tenaga kerja asing, penurunan standar gaji karyawan/buruh di Swiss, jalanan macet, kekurangan lahan untuk tempat tinggal, juga permintaan tempat tinggal yang semakin banyak membuat harga sewa tempat tinggal semakin mahal, dan penyalahgunaan bantuan sosial baik dari pencari suaka maupun pengangguran. Ancaman terhadap keamanan pribadi yang meliputi peningkatan angka kriminalitas, dan ancaman terhadap keamanan komunitas yang meliputi kekhawatiran akan kehilangan nilai tradisional Swiss (adat dan budaya) dan nilai kebanggaan rakyat Swiss.

Pelaksanaan referendum imigrasi Swiss adalah pembuktian bahwa kedaulatan rakyat masih menjadi kekuasaan tertinggi yang ada di Swiss. Meskipun pihak pemerintah telah menyarankan untuk menolak inisiatif populer *Anti-Immigration* tersebut, namun keputusan masyarakat Swiss yang dihasilkan melalui tetap harus ditaati oleh pemerintah Swiss.

Daftar Pustaka

Buku

Acharya, Amitav. 2004. *“Human Security in East Asia part II”*. Chapter The Nexus Between Human Security and Traditional Security in Asia. Korean: Korean National Commission for UNESCO.

Bali, Sita, at.all. 2001. *“Issues in World Politics”*. London:Macmillan Publisher Limited 1997.

Bhagwati, Jagdish. 2004. *“In Defense of Globalization”*. Chapter 3. London: Oxford University Press.

Buzan, Barry, Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. *“Security: A New Framework of Analysis”*. London: Lynne Rienner Publisher.

Kriesi, Hanspeter dan Alexander H. Trechsel. 2008. *“The Politics of Switzerland: Continuity and Change in Consensus Democracy”*. New York: Cambridge University Press.

Linder, Wolf. 1994a. *“Multicultural Switzerland and the Challenge of Immigration”*. Terdapat di <http://www.wolf-linder.ch/wp-content/2010/11/Swiss-Politics-of-Immigration6.pdf> diakses pada 24 Februari 2016.

Linder, Wolf. 1998b. *“Swiss Democracy : Possible Solution to Conflict in Multicultural Societies”*. New York : Palgrave Macmillan. Artikel Online. dalam <http://www.wolf-linder.ch/wp-content/2010/11/Swiss-Politics-of-Immigration6.pdf> diakses 24 Februari 2016.

Federal Office for Migration. 2013. *“Migration Report 2013”* terdapat di <https://www.sem.admin.ch/dam/data/publiservice/berichte/migrationbericht-2013-e.pdf> diakses pada 23 Mei 2017.

United Nations Trust Fund for Human Security. *“Human Security In Theory and Practice”*. dalam http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/news-from-new-horizons/issue-41/UNDP-TR-HSHandbook_2009.pdf diakses pada 30 Mei 2016.

Waever, Ole. 1995. *“Securitization and Desecuritization dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) On Security”*. New York: Columbia University Press. Terdapat di lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983Permasalahan%20arus.pdf diakses pada 11 Maret 2017.

Website

Church, Clive H. 2004a. “*The Politics and Government of Switzerland*”, New York : Palgrave Macmillan, terdapat di <http://www.euractiv.com/sections/global-europe/swiss>. diakses pada 23 Februari 2016.

Cross-Border Commuters and Trips:Relevance of Schengen terdapat di Bruegel.org/cross-border-commuters-and-relevance-of-schengen/ diakses pada 23 Mei 2017.

EU relations with Switzerland, tersedia di http://eeas.europa.eu/switzerland/index_en.htm diakses pada 10 Mei 2017.

Federal Office For Migration, *Statistics From the Aliens and Asylum Sectors*, reportasi, terdapat di <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/2013/ts-2013-e.pdf> diakses pada 23 Mei 2017.

Information Platform Human Rights Racism is also reality in Switzerland. 2015. Tersedia di <http://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/racism/studies/racism-a-reality-switzerland-4552> diakses pada 20 Mei 2017.

Schelbert, Leo. 2007. “*Historical Dictionary of Switzerland*”. Maryland: The Scarecrow Press, Inc. terdapat di books.dpfiles.ru/regenerate/booltoday.ru diakses pada 13 Mei 2017.

Switzerland and the World, dalam http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/switzerland_and_the_world/, diakses pada 16 Juli 2017.

Switzerland has highest number of immigrant, 2014, terdapat di http://www.swissinfo.ch/eng/migration-outlook_switzerland-has-highest-number-of-immigrants/41145410 diakses pada 23 Februari 2016.

Swiss Social Poverty Claim terdapat di <https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/work-income/surveys/sesam.assedetail.html> diakses pada 12 April 2017.

Ulbricht, Veronika. 2016. “*Kriminalitt in der Schweiz*”. Diakses melalui <http://mussenstellen.com/article/kriminalitt-in-der-schweiz> pada 20 Mei 2017.

Jurnal

Acherman, Christin, Clément de Senarclens, Robin Stünzi. 'Migration and Security in Switzerland: Evolution and present status of its link in politics and law'. 2013. Universitas Neuchatel. terdapat di www3.unine.ch/files/live/.../Final%20report%20public-1.pdf pada 9 Maret 2017

Council of Europe. 'Switzerland in Europe after the Referendum on Immigration Quotas'. Jurnal Online. terdapat di http://www.coe.int/t/policyplanning/ALER_T/Synopses/ALER-T_51.pdf diakses 24 Februari 2016.

SVP, 'Party Programme', tersedia di http://www.svp.ch/de/assets/File/positionen/partieprogramm/svp_partieprogramm_e.pdf diakses pada 12 April 2017.